

# **LAPORAN SINGKAT**

# KOMISI VI DPR RI BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke : 17 (tujuh belas) Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : IV

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi

VI DPR RI

Rapat dengan : 1. Menteri Bada Usaha Milik Negara (BUMN) RI

2. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI

Danantara)

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025

Pukul : 10.00 WIB Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Ketua Komisi VI DPR RI) Sekretaris Rapat : Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

A c a r a : Pemaparan *roadmap* serta Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) Holding Operasional dan Badan

Pengelola Investasi Danantara Indonesia

Hadir : 1. 32 orang dari 47 Anggota Komisi VI DPR RI.

2. a. Menteri BUMN RI, Sdr. Erick Thohir;

b. Wakil Menteri BUMN RI, Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;

c. Wakil Menteri BUMN RI, Sdr. Aminuddin Ma'ruf;

d. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia

(BPI Danantara), Sdr. Rosan Roeslani.

e. Managing Director Stakeholder Management Danantara,

Sdr. Rohan Hafas.

f. CEO Danantara Asset Management, Sdr. Dony Oskaria.

beserta jajarannya.

#### I. PENDAHULUAN

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dan RDP Komisi VI DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Rapat Kerja dan RDP Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 23 Juli 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ibu Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M, Ketua Komisi VI DPR RI.

## II. KESIMPULAN

- Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI dan Kepala BPI Danantara terkait beberapa hal sebagai berikut:
  - a. struktur entitas Danantara yaitu BPI Danantara, Holding Operasional (PT Danantara Asset Management) dan Holding Investasi (PT Danantara Investment Management) beserta masing-masing kewenangan dan perannya;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Asset Management (Persero) Tahun 2025 sebagai holding operasional BUMN dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Restrukturisasi Bisnis Maskapai;
    - 2) Restrukturisasi Bisnis Manufaktur Baja;
    - 3) Restrukturisasi Bisnis Kereta Cepat;
    - 4) Restrukturisasi Bisnis Asuransi;
    - 5) Konsolidasi Bisnis BUMN Karya;
    - 6) Konsolidasi Bisnis Pupuk;
    - 7) Konsolidasi Bisnis Rumah Sakit;
    - 8) Konsolidasi Bisnis Perhotelan;
    - 9) Konsolidasi Bisnis Gula;
    - 10) Konsolidasi Bisnis Hilir Minyak;
    - 11) Konsolidasi Bisnis Asuransi;
    - 12) Konsolidasi Bisnis Manajemen Aset;
    - 13) Konsolidasi Bisnis Kawasan Industri;
    - 14) Pengembangan Bisnis Koperasi Merah Putih:
    - 15) Pengembangan Bisnis Pangan;
    - 16) Pengembangan Bisnis Baterai Kendaraan Listrik;
    - 17) Pengembangan Bisnis Farmasi;
    - 18) Pengembangan Bisnis Semen;
    - 19) Pengembangan Bisnis Perbankan Syariah;
    - 20) Pengembangan Bisnis Telekomunikasi;
    - 21) Pengembangan Bisnis Galangan Kapal;
    - 22) Penyelesaian tata kelola pendukung bisnis dan organisasi PT Danantara Asset Management melalui kebijakan dan prosedur *Human Capital*, keuangan, manajemen risiko, dan legal untuk mendukung operasionalisasi PT Danantara Asset Management.
- 2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI dan BPI Danantara untuk memberikan perhatian penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan RKAP Tahun 2025 PT Danantara Asset Management (Persero) dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memastikan dalam setiap pelaksanaan rencana kerja selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian yang didahului uji kelayakan bisnis yang tepat dan efektif;
  - b. Meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan dana pada setiap rencana kerja sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan; dan
  - c. Memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* dalam setiap pelaksanaan rencana kerja pada BUMN.

- Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI, BPI Danantara dan PT Danantara Asset Management (Persero) untuk melaporkan pelaksanaan RKAP Tahun 2025 PT Danantara Asset Management (Persero) secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
- 4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI dan BPI Danantara untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan BUMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih fungsi, tugas dan kewenangan.
- 5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI, BPI Danantara dan PT Danantara Asset Management (Persero) untuk mempercepat transformasi BUMN melalui internalisasi budaya perusahaan "melayani sepenuh hati" secara konsisten dan terus menerus.
- 6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI, BPI Danantara dan PT Danantara Asset Management (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan lengkap.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

MENTERI BUMN RI,

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI KETUA RAPAT,

Ttd.

Ttd.

**ERICK THOHIR** 

Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M A-48

KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (BPI DANANTARA),

Ttd.

**ROSAN ROESLANI**